

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi khususnya Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum belum optimal dilakukan karena masih banyaknya pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Pengawasan yang dilakukan rutin secara langsung oleh tim pengawas dan tim penjemput yang turun ke lapangan guna memantau dan menghimbau para petugas juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu, mengawasi petugas parkir di lapangan, mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir dan mengawasi penyetoran retribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara maksimal karena masih banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Perhubungan, hal tersebut dikarenakan pengawasan yang dilakukan telah berjalan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Kendala-kendala tersebut yaitu terdiri dari dua:
  - a. Permasalahan Yuridis

Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar peraturan perparkiran, sehingga masih banyak yang belum sadar dan belum jera akan pentingnya penyelenggaraan perparkiran.

b. Permasalahan Non-Yuridis

- 1) Permasalahan terhadap setoran yang menunggak.
- 2) Kurangnya jumlah pengawas.
- 3) Banyaknya juru parkir yang tidak resmi.
- 4) Karcis parkir yang tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir dan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan.
- 5) Atribut penanda juru parkir resmi yang tidak digunakan saat melakukan pungutan retribusi parkir.
- 6) Kurangnya ketersediaan lahan parkir yang berakibat kemacetan arus lalu lintas dikarenakan banyak kendaraan yang parkir memakan ruas jalan.

**B. Saran**

1. Dinas Perhubungan Kota Jambi harus mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana fasilitas parkir agar tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan perparkiran sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan parkir.
2. Pentingnya dilakukan pembinaan untuk petugas parkir sebelum menjalankan tugasnya agar petugas parkir tersebut memahami apa saja yang menjadi kewajiban bagi petugas parkir saat sedang bertugas di lapangan sehingga tidak lagi terjadi ketidaksesuaian dengan Surat

Perintah Tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing petugas parkir.

3. Bidang pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi harus melakukan upaya yang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir agar tidak lagi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Dan juga perlunya sosialisasi kepada juru parkir serta masyarakat agar mengetahui dan memahami tentang larangan-larangan dan aturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan baik bagi penyedia maupun pengguna jasa parkir. Selain itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan parkir yang ikut berperan serta memberi masukan dan pengaduan jika fakta yang terjadi di lapangan masih banyak petugas juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan perparkiran akan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

